



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2017**



**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. LKjIP OPD tahun 2017 merupakan wujud komitmen nyata Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam meningkatkan transparansi serta mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat dalam mengukur pencapaian kinerja atas target – target pembangunan yang telah ditetapkan selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan melalui LKjIP ini.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk memperoleh gambaran atas implementasi Rencana Strategis (Renstra) kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) maupun Penetapan Kinerja (PK) yang dijabarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing bidang/UPT, serta sebagai bahan evaluasi atas hasil kebijakan yang telah dilaksanakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan kedepannya. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, Februari 2018

**KEPALA DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660517 199008 2 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	Hal ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	1
A. LATAR BELAKANG	.....	1
B. LANDASAN HUKUM	.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	.....	3
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	.....	3
E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARPRAS	.....	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	.....	7
A. RENCANA STRATEGIS	.....	7
B. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2017	.....	12
C. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2017	.....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016</b>	.....	15
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN	.....	15
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	.....	22
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	.....	23
<b>BAB IV PENUTUP</b>	.....	28
A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN	.....	28
B. PERMASALAHAN ATAU KENDALA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA	.....	29
C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	.....	29
<b>LAMPIRAN</b>		
1. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)	.....	32
2. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2013	.....	34

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Kekuatan Personil PNS Menurut Golongan .....	5
Tabel 2. Kekuatan Personil PNS Menurut Pendidikan .....	5
Tabel 3. Struktur Esselon PNS Menurut Jenis Kelamin .....	5
Tabel 4. Tanah dan Gedung Yang Dimiliki .....	6
Tabel 5. Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki .....	6
Tabel 6. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017 .....	14
Tabel 7. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-1 .....	16
Tabel 8. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-2 .....	18
Tabel 9. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-3 .....	19
Tabel 10. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-4 .....	20
Tabel 11. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-5 .....	21
Tabel 12. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-6 .....	22
Tabel 13. Perbandingan Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2016 .....	23
Tabel 14. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017 .....	24
Tabel 15. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2017 .....	25

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2018 adalah "**Sejahtera bersama Koperasi dan UMKM**". Guna mewujudkan tujuan dimaksud, terdapat 8 (delapan) sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah
2. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah
3. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah
4. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM
6. Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM
7. Meningkatnya kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM
8. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur.

Dari 8 (delapan) sasaran tersebut, dijabarkan ke dalam 14 (empat belas) indikator kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2017. Adapun hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dari ke-14 indikator tersebut menunjukkan hasil kinerja yang **Amat Baik** (106,71%), serta terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.051.018.964,-. Penjelasan secara lengkap mengenai kinerja maupun realisasi penyerapan anggaran dapat dilihat pada Bab III.

Meskipun selama tahun 2017 upaya pembinaan dan pemberdayaan telah dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh masyarakat KUMKM, yaitu :

1. Tingkat pemahaman masyarakat tentang peran dan manfaat koperasi relatif terbatas. Hal ini menjadikan koperasi belum menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana perekonomian.
2. Lambatnya regenerasi pengurus koperasi mengakibatkan kualitas sumber daya manusia relatif terbatas dan kurang kompetitif.
3. Koperasi belum sepenuhnya menerapkan azas, nilai-nilai dan prinsip-prinsip sesuai dengan jati diri perkoperasian.
4. Tingkat produktivitas dan daya saing UMKM belum optimal akibat keterbatasan permodalan serta rendahnya penguasaan proses produksi dan teknologi.

5. Tidak seimbangnya antara jumlah aparatur pembina dengan jumlah koperasi dan UMKM yang ada, selain itu lemahnya dukungan sarana prasarana dan tingkat pengetahuan yang sangat heterogen mengakibatkan upaya pemberdayaan dan pembinaan KUMKM di Jawa Tengah belum optimal.
6. Jumlah aparatur pembina koperasi dan UMKM di daerah relatif terbatas, selain itu kapasitas dan dukungan sarana prasarana bagi aparatur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan juga kurang memadai.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dimaksud adalah:

1. Mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perkoperasian sehingga koperasi dapat menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana perekonomian.
2. Mendorong regenerasi pengurus koperasi dan peningkatan kemampuan serta kapabilitasnya.
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing KUMKM
4. Mendorong kabupaten/kota dalam untuk menyediakan dukungan sarana prasarana serta pelatihan bagi aparatur pembina Koperasi dan UMKM di daerah